



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

SANJAYA ADI PRATAMA bin RUDI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 05, RW 02, Kampung Waraitama, Distrik Manimeri, Kabupaten Bintuni sebagai Pemohon I;

TIKA MUALIMAH binti SUMEDI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 05, RW 02, Kampung Waraitama, Distrik Manimeri, Kabupaten Bintuni sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 2 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2019, di Kampung Waraitama, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumedi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menjadi *Munakih* (*yang menikahkan*) wali nikah tersebut, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Sutardi dan Ahmadi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (SANJAYA ADI PRATAMA bin RUDI) dan Pemohon II (TIKA MUALIMAH BINTI SUMEDI) yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2019, di Kampung Waraitama, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal 2 Agustus 2019, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Manokwari untuk memanggil para Pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah, meskipun menurut relaas pengumuman Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal 20 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Mw., tanggal 2 Agustus 2019, gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa
hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 96.000,00 |

(Sembilan puluh enam ribu rupiah);